

PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG PERIODE 2020-2022

Siti Nahrul Mukhoddasah^{1*}, Johan Afandi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Institut Agama Islam Negeri Kudus

* Korespondensi: sitinahrul00@gmail.com

Abstract

This research aims to be a source of knowledge regarding the economic level, efficiency and effectiveness of the Rembang Regency Government Budget Realization Report. The type of research used in this research is descriptive quantitative. The population in this research is all budget realization report data using the sampling method, namely the purposive sampling method. Researchers chose to use secondary data with documentation and observation data collection techniques. The data that has been collected is then calculated using the value for money method and then conclusions are drawn. The research results show that in terms of economic ratios, Rembang district is said to be economical because in the last 3 years it has been at a percentage of 90%-100%. In terms of efficiency ratios, the Rembang district government has experienced a drastic decline over the last 3 years, with an average of 93.09% falling under the criteria of being less efficient. In terms of effectiveness ratio, the Rembang district government has experienced ups and downs in percentage over the last 3 years, but it is not bad because the average is 99.9%. Viewed from an economic perspective from an Islamic perspective, the Rembang Regency Government carries out its financial performance economically, by not committing wasraf/waste. In terms of efficiency from an Islamic perspective, it is still not good, because lack of efficiency is considered a violation of the mandate carried out. In terms of effectiveness, it is in accordance with an Islamic perspective, according to a hadith from Muslim history which describes the importance of choosing good and responsible leaders in government.

Keywords: *Budget Realization Report; Islamic perspective; Public Sector; Value For Money.*

How to cite:

Mukhoddasah, S. N., & Afandi, J. (2024). Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemerintahan Kabupaten Rembang Periode 2020-2022. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 10(1), 68-83

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik sebagai organisasi pemerintah yang berwenang mengelola roda pemerintahan dengan sumber keabsahannya berasal dari masyarakat sehingga segala sesuatu yang di laksanakan oleh pemerintah harus secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kepercayaan dari masyarakat perlu di wujudkan secara bersih. Penyelenggaraan pembentukan sektor publik harus melahirkan *good governance* yang kerap disebut sebagai tata pemerintahan yang baik. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia saat ini, menjadikan organisasi sektor publik yang mengedepankan *good governance* wajib dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik dalam melaksanakan tugasnya menemui berbagai rintangan dan dorongan agar bekerja lebih efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan biaya sosial, juga konsekuensi buruk atas semua kegiatan yang dikerjakan, sebab seringkali organisasi sektor publik dinilai kurang efisien dan melakukan berbagai pemborosan yang dapat menyebabkan kerugian bagi institusi (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi pemerintahan daerah telah ditetapkan dan setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan warga searah dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dimaknai seperti kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Landasan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekuatan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dapat menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam aspek keuangan. Sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja keuangan daerah sebagai acuan dalam penentuan kebijakan untuk tahun anggaran berikutnya (Maryanti & Agus, 2021: 86-99). Menurut Tito dkk (2020: 339-46) Penerapan otonomi daerah ini membawa logika dasar yang memerlukan manajemen keuangan yang efektif serta efisien, dimulai dari tahap penyusunan, pengoperasian, hingga pengawasan. Tujuan otonomi daerah adalah menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah, sehingga mengecilkan ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. Secara tak langsung, pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki wilayahnya, salah satunya dengan meningkatkan belanja daerah.

Menurut Lontaan & Pangerapan (2016) Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilaksanakan oleh daerah, ditempatkan berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan fungsi agar semua kelompok masyarakat dapat menikmatinya tanpa diskriminasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu fondasi utama dalam penyusunan program pengembangan pemerintah daerah. Melalui penyusunan ini, pemerintah daerah berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan, khususnya dalam merencanakan APBD. Pengelolaan APBD yang efektif perlu mengutamakan kepentingan umum, sehingga realisasi dan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang didanai dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan mencukupi kebutuhan serta tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang berfokus pada kepentingan umum. Namun, saat pelaksanaannya, masih ada masalah dalam sistem pengelolaan APBD (Richardo & Royke, 2022: 61-71).

Pada akhir tahun 2019, dunia sedang menghadapi permasalahan besar dengan merebaknya penyakit akibat virus corona atau orang-orang menyebutnya dengan Covid-19. Wabah Covid-19 terbukti berdampak terhadap kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia, serta efek yang meluas di seluruh wilayah. Perekonomian daerah-daerah terancam, memperburuk kondisi yang sudah ada. Sebagai respons, pemerintah

Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk menekan angka penyebaran virus secara optimal (Muhammad: 2022). Di Indonesia, pemerintah memilih penerapan *social distance* sebagai solusi dibandingkan penerapan *lockdown*. Motif mendasar mengapa Indonesia memilih pembatasan sosial dilakukan karena banyaknya warga yang bergantung pada penghasilan harian, sehingga mereka akan rentan tidak dapat mencari nafkah jika dilakukan *lockdown*.

Permasalahan covid 19 yang tidak kunjung usai membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sehingga pemerintah daerah mulai memberikan bantuan sosial. Dampak wabah covid-19 membuat pemerintah kabupaten Rembang mengeluarkan SK perubahan keempat Rencana Operasional Percepatan Penanggulangan *Corova Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Rembang Tahun pendanaan 2021 dengan semua biaya yang ada sebagai ditetapkannya keputusan Bupati di titik beratkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Abdul: 2020). Atas dasar surat keputusan tersebut APBD belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga anggaran belanja yang telah dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi yang didapatkan. Ketidaksesuaian realisasi yang telah dianggarkan menimbulkan isu bahwa pada Agustus tahun 2023 APBD Rembang mengalami defisit sebesar Rp 143 Miliar, bahkan berpotensi membekak kurang lebih Rp 290 miliar, kejadian ini disebabkan oleh beberapa aspek pendanaan yang tidak diperhitungkan selama setahun terakhir (Abdul & Vachri, 2023).

Kinerja kabupaten Rembang yang masih kurang baik dalam perencanaan anggaran berdampak terjadinya defisit, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi serta penilaian terhadap karyawan, jadi pemerintah dapat mengetahui karyawan yang memiliki potensi produktivitas yang baik dan kurang baik dalam menentukan keputusan yang terkait dengan kinerja. Sebagai pemimpin yang baik, maka diperlukan cara mengambil keputusan yang adil, seperti yang diajarkan dalam surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Allah SWT memerintahkan orang-orang bertaqwa agar selalu menjalankan tugas serta amal mereka dengan jujur, teliti, adil, dan ikhlas karena Allah SWT. Di akhir ayat, Allah berjanji kepada orang beriman yang banyak melakukan amal saleh akan mendapat pengampunan dan ganjaran yang besar.

Mengukur kinerja keuangan daerah merupakan topik yang menarik untuk dipelajari secara lanjut. Konsep *value for money* yang mengedepankan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif) merupakan hal yang telah lama dikenal, dan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan anggaran kinerja suatu pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan yang ekonomis, dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Efisien dengan meraih hasil seoptimal mungkin melalui sumber daya yang tersedia. Efektif dengan mencapai tujuan program sesuai target yang ditetapkan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dan harus dijalankan secara menyeluruh (Tito dkk, 2020: 339-46).

Permasalahan yang muncul menarik minat peneliti untuk mengukur dan mengkaji tingkat perekonomian, efisiensi dan efektivitas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Rembang periode 2020 sampai dengan periode 2022 dengan menerapkan metode *Value For Money*. Secara kontekstual, penelitian ini bermaksud menjadi sumber pengetahuan mengenai tingkat keekonomian, efisiensi dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang. Salah satu hasil praktis yang

diinginkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi prestasi. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji keberhasilan dan pengelolaan laporan keuangan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan umum, serta menjadi standar pemicu kinerja entitas sektor publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap halayak umum. Dari segi pemerintah, penelitian ini semoga dapat menjadi acuan pemantauan efektivitas alokasi anggaran, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan di masa depan.

REVIU LITERATUR

Good Governance

Good governance yaitu konsep yang mengarah pada proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Konsep ini didasarkan pada konsensus yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. *Good Corporate Governance* memiliki Sembilan prinsip, yaitu partisipasi warga, supremasi hukum, kepedulian terhadap warga, keselarasan dengan konsensus, efektivitas dan efisiensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menunjukkan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang apik untuk menumbuhkan tata kelola yang sehat, khususnya pada pengelolaan keuangan negara dan daerah (Woleola, 2017:154-61).

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Siregar dalam Fanda Mentang, LRA atau Laporan Pendapatan Daerah adalah dokumen yang menginformasikan ringkasan tentang asal usul, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini juga menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. LRA menyajikan hal-hal seperti realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelapor serta entitas akuntansi.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas dan berpotensi mengulangi informasi berikut pada setiap halaman laporan : nama entitas pelapor dan entitas akuntansi atau bentuk sebutan lainnya, periode yang dipilih, mata uang pelaporan, dan satuan numerik yang digunakan. Laporan Realisasi Anggaran wajib ditampilkan minimal satu kali dalam setahun (Syafrudin, 2016: 1-23).

Kegunaan LRA akan berkurang jika laporan tersebut tidak segera tersedia. Rumitnya operasional Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi alasan entitas pelaporan dan akuntansi gagal mempublish laporan keuangan dengan cepat. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan, entitas pelapor wajib menyajikan LRA paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, sedangkan entitas akuntansi wajib menyajikannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku (Karjono & Sulistianingsih, 2020: 272-302).

Laporan Realisasi Anggaran sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk menilai kinerja pemerintah atau dinas. LRA memuat informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan komponen-komponen ini, LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dan efisiensi anggaran. Penghitungan ini dapat dilaksanakan dengan menyandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan kenyataannya (Heri & Agustina, 2020: 1-10).

Pengukuran Kinerja

Kinerja organisasi publik harus dinilai kesuksesannya untuk dapat dievaluasi kualitas pelayanan umum yang mereka bagikan (Jadid, dkk (2020: 56-57). Pengukuran kinerja melibatkan penilaian pencapaian pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mencakup evaluasi efisiensi penyediaan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (diukur berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan), membandingkan hasil program dengan tujuan yang diharapkan, dan menilai efektivitas tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut (Mahsun,

Kinerja keuangan mencerminkan situasi finansial perusahaan pada periode tertentu, termasuk bagaimana perusahaan mengumpulkan dan mengalirkan dana. Umumnya, kinerja keuangan dinilai dengan memperhatikan indikator-indikator seperti kepuasan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan: 2006). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi kuantitatif terhadap kegiatan atau program dalam mencapai target dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan tindakan yang diambil guna meningkatkan kualitas sektor publik (Sari & Wati

Kinerja Dalam Perspektif Islam

Menurut Zadjuli dalam Yoga (2019), Islam menilai kinerja keagamaan seseorang dengan melihat beberapa indikator, antara lain niat bekerja karena Allah, ketika bekerja berpedoman pada aturan/normal/syariah secara kaffah. Adab atau etika yang sesuai dengan prinsip islam dalam menggapai kinerja yang baik yaitu :

1. Amanah

Amanah merupakan dasar tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam menjalankan pekerjaan, seseorang harus bertanggung jawab kepada negara, organisasi, masyarakat, dan individu. Seperti yang tertuang dalam hadist di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ (صحيح البخاري)."

Artinya: Ibnu Umar RA meriwayatkan: Rasulullah SAW bersabda, Seorang pemimpin merupakan pelindung dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. (Sahih al-Bukhari)

2. Bertanggung jawab

Tanggung jawab mengacu pada kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan tindakan atau mengelola sesuatu. Ini melibatkan kesadaran akan akibat dari tindakan tersebut dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma, hukum, atau standar yang berlaku. Pemerintahan yang tanggung jawab mengacu pada kewajiban pemimpin atau pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, memenuhi harapan masyarakat, dan bertanggung jawab dalam memberi keputusan dan tindakan yang diambil. Seperti yang tertuang dalam hadist dibawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتَعْمَلَ النَّاسُ الْعُلُظَّ فِي الْأَمْرِ أُعِقِبُوا بِهِمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: Jika manusia mengangkat orang-orang kasar dalam urusan (pemerintahan), mereka akan ditimpa oleh orang-orang tersebut. (HR. Muslim)

3. Melakukan Penghematan

Dalam Islam, israf (pemborosan) dianggap sebagai perilaku yang tidak disukai karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan tanggung jawab. Seperti hadis di bawah ini yang menyampaikan tentang larangan israf. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَيُبْغِضُ الْإِسْرَافَ -
(رواية غير محددة المصدر بدقة) -

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai melihat tanda nikmat-Nya pada hamba-Nya dan Dia membenci israf.

Value for money

Menurut Mardiasmo (2015), *value for money* dalam pengelolaan organisasi sektor publik berpusat pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perekonomian melibatkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya terendah, dengan membandingkan masukan tersebut dengan nilainya dalam istilah moneter. Efisiensi berarti memaksimalkan output dengan input tertentu atau menggunakan input paling sedikit untuk menggapai output tertentu, dengan membandingkan keluaran/masukan terhadap standar atau sasaran kinerja yang telah diputuskan. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil program mencapai target yang ditentukan, dengan membandingkan outcome terhadap output.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh data laporan realisasi anggaran (LRA), dengan metode penentuan dalam pengambilan sampel yang dipilih penulis yaitu *purposive sampling method*. Adapun pertimbangan dilakukan dengan cara berurutan yaitu analisa terhadap laporan realisasi anggaran kabupaten Rembang dari pasca covid, realisasi belanja yang tidak seimbang dengan pendapatan belanja, dan adanya pemberitaan bahwa pemerintah kabupaten Rembang mengalami defisit pada tahun 2023, dengan mempertimbangkan alasan tersebut penulis menentukan sampel yaitu laporan realisasi anggaran pada kabupaten Rembang tahun 2020 - 2022. Peneliti memilih menggunakan data sekunder untuk memperoleh informasi dalam melengkapi kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan observasi. Setelah mendapat angka rasio, dilanjutkan pengukuran rasio dengan rumus yang ada pada metode *value for money*. Pengukuran inti kinerja pada organisasi sektor pemerintah menggunakan metode ini, kemudian dijelaskan dan ditafsirkan hasil dari angka-angka rasio tersebut. Terakhir, menarik kesimpulan dengan melakukan evaluasi dan analisis proporsi, prestasi, serta rasio untuk mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Rembang. Berikut data yang sekunder yang digunakan peneliti:

Tabel 1
Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	1.867.686.369.423,00	1.878.325.919.915,50	1.493.626.825.553,00	1.425.834.550.259,20
2021	1.849.139.775.254,62	1.892.657.491.765,46	1.907.473.943.742,72	1.802.417.454.491,00
2022	1.902.531.081.903,00	1.841.484.139.352,53	2.232.003.097.935,00	1.991.790.018.142,71

Sumber: website rembangkab.go.id 2023

HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan Ekonomi

Ekonomis mengacu pada pengadaan sumber daya dengan biaya yang lebih rendah atau mendekati harga pasar. Aktivitas operasional dianggap ekonomis ketika dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak penting. Semakin baik kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penggunaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan maka semakin tinggi nilai rasio ekonomisnya.

Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio ekonomis penelitian ini memakai rumus perhitungan berikut ini :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Golongan ekonomis adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila >100% tergolong Sangat Ekonomis
- 2) Apabila >90-100% tergolong Ekonomis
- 3) Apabila >80-90% tergolong Cukup Ekonomis
- 4) Apabila >60-80% tergolong Kurang Ekonomis
- 5) Apabila <60% tergolong Tidak Ekonomis

Tabel 2
Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Rembang

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomi
2020	1.425.834.550.259,20	1.493.626.825.533,00	95,46%
2021	1.802.417.454.491,00	1.907.473.943.742,72	94,49%
2022	1.991.790.018.142,71	2.232.003.097.935,00	89,23%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja di atas, dapat dilakukan pengukuran seperti berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis Tahun 2020} = \frac{1.425.834.550.259,20}{1.493.626.825.533,00} \times 100\% = 95,46\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis Tahun 2021} = \frac{1.802.417.454.491,00}{1.907.473.943.742,72} \times 100\% = 94,49\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis Tahun 2022} = \frac{1.991.790.018.142,71}{2.232.003.097.935,00} \times 100\% = 89,23\%$$

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Menurut Pratama dkk (2022: 149-55) Efisiensi merujuk pada keberhasilan output yang optimal dengan penggunaan input tertentu yang minimal atau rendah. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk mengapai keberhasilan kerja atau produk dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran seefisien mungkin. Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dikatakan efisien jika rasio yang didapat tidak melebihi 90%. Semakin kecil persentase rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam mengelola sumber daya dan dananya.

Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio efisiensi penelitian ini dilakukan dengan rumus perhitungan berikut ini :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Golongan efisiensi adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila >100% tergolong Tidak Efisien
- 2) Apabila >90-100% tergolong Kurang Efisien
- 3) Apabila >80-90% tergolong Cukup Efisien
- 4) Apabila >60-80% tergolong Efisien
- 5) Apabila <60% tergolong Sangat Efisien

Tabel 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Rembang

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2020	1.425.834.550.259,20	1.878.325.919.915,50	75,90%
2021	1.802.417.454.491,00	1.892.657.491.765,46	95,23%
2022	1.991.790.018.142,71	1.841.484.139.352,53	108,16%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja di atas, dapat melakukan penjumlahan sebagai berikut :

$$Rasio\ Efisiensi\ Tahun\ 2020 = \frac{1.425.834.550.259,20}{1.878.325.919.915,50} \times 100\% = 75,90\%$$

$$Rasio\ Efisiensi\ Tahun\ 2021 = \frac{1.802.417.454.491,00}{1.892.657.491.765,46} \times 100\% = 95,23\%$$

$$Rasio\ Efisiensi\ Tahun\ 2022 = \frac{1.991.790.018.142,71}{1.841.484.139.352,53} \times 100\% = 108,16\%$$

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Menurut Ulum (2005) Efektivitas menggambarkan seberapa baik output program mencapai tujuan program. Semakin besar output yang selaras dengan tujuan atau target yang telah ditentukan, maka akan semakin efektif pula proses kerja organisasi. Keberhasilan dalam mencapai tujuan menandakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Kinerja pemerintah kabupaten Rembang dianggap efektif jika rasio yang dihasilkan melebihi 100%. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja pemerintah kabupaten Rembang.

Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio efektivitas penelitian ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Ukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila >100% artinya Sangat Efektif
- 2) Apabila >90-100% artinya Efektif
- 3) Apabila >80-90% artinya Cukup Efektif
- 4) Apabila >60-80% artinya Kurang Efektif
- 5) Apabila <60% artinya Tidak Efektif

Tabel 4
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Rembang

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah Daerah	Rasio Efektivitas
2020	1.878.325.919.915,50	1.867.686.369.423,00	100,56%
2021	1.892.657.491.765,46	1.849.139.755.254,62	102,35%
2022	1.841.484.139.352,53	1.902.531.081.903,00	96,79%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pendapatan di atas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2020} &= \frac{1.878.325.919.915,50}{1.867.686.369.423,00} \times 100\% = 100,56\% \\ \text{Rasio Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{1.892.657.491.765,46}{1.849.139.755.254,62} \times 100\% = 102,35\% \\ \text{Rasio Efektivitas Tahun 2022} &= \frac{1.841.484.139.352,53}{1.902.531.081.903,00} \times 100\% = 96,79\% \end{aligned}$$

Pembahasan

Rasio Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rasio ekonomis pada tahun 2020-2021 berada pada kategori ekonomis dengan hasil 95,46% dan 94,49%. Dikatakan masuk kriteria ekonomis karena terletak pada angka >90% sampai 100%. Kriteria ekonomis dapat diartikan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2021 tergolong baik. Konsep rasio ekonomis itu penghematan yang meliputi manajemen secara hati-hati dan tanpa pemborosan. Semakin tinggi persentase ekonomi maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, rasio ekonomis yang terendah terjadi pada periode 2022, yang mana golongan rasio ekonomis yang seharusnya diperoleh kabupaten Rembang yaitu >100% namun dari tahun 2022 pencapaian rasio ekonomis malah semakin menurun berada pada golongan cukup ekonomis dengan hasil 89,23%. Hasil ini dikatakan cukup ekonomis karena berada pada angka >80%-90%. Cukup ekonomisnya kinerja keuangan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan antar rencana pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan pengeluaran aktual yang terjadi. Kinerja keuangan yang cukup ekonomis seperti ini menggambarkan pemerintahan Kabupaten Rembang yang sedang mengalami defisit anggaran yaitu situasi di mana pengeluaran melebihi penerimaan.

Dilihat dari segi ekonomis dalam perspektif islam Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan kinerja keuangan dengan ekonomis. Terbukti dalam perhitungan dengan mengaplikasikan metode *value for money* hasil menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2022 dari segi ekonomis memiliki rata-rata 93,06%, hasil ini masuk pada kategori ekonomis dimana kategori ekonomis dimulai >90%-100%. Sehingga dalam segi perspektif islam pemerintah Kabupaten Rembang tidak melakukan pemborosan. Dalam Islam, israf (pemborosan) dianggap sebagai perilaku yang tidak disukai karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan tanggung jawab.

Rasio Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan rasio efisiensi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi selama 2020-2022 selalu mengalami

penurunan kriteria. Pada tahun 2020 sebesar 75,90% masuk kategori efisien karena berada pada angka >60%-80%, tahun 2021 sebesar 95,23% masuk tolak ukur kurang efisien sebab berada pada angka >90%-100%, sedangkan tahun 2022 sebesar 108,16% masuk kategori tidak efisien karena >100%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Rembang belum mencapai target anggaran belanja sesuai dengan yang ditentukan, yang berarti pengeluaran untuk mencapai target anggaran belanja melebihi pendapatan yang diperoleh.

Ketidak efisienan menggambarkan penggunaan sumber daya keuangan yang tidak optimal. Pengeluaran yang tidak terkontrol atau penggunaan dana yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya keuangan. Ketidak mampuan mengelola hutang dalam sebuah organisasi yang terlalu bergantung pada hutang untuk membiayai operasinya dan tidak mampu mengelola hutang dengan baik dapat menyebabkan beban yang tinggi dan membebani kondisi keuangan secara keseluruhan. Keterlambatan dalam pembayaran hutang atau tagihan juga dapat menimbulkan biaya tambahan berupa bunga atau denda. Jika sebuah organisasi tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasionalnya, hal ini dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang tidak efisien.

Pemerintah Kabupaten Rembang dilihat dari segi efisiensi dalam perspektif islam masih belum baik. Ini dibuktikan dengan perhitungan yang mengaplikasikan metode *Value For Money* menunjukkan hitungan yang tidak efisien. Ketidak efisienan dalam sebuah pemerintahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diemban. Pemerintah atau pemimpin yang efisien dan amanah akan lebih mungkin untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap mempertanggungjawabkannya.

Rasio Efektivitas

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan tingkat efektivitas menunjukkan selama 2020-2021 berada pada kriteria sangat efektif karena >100%, dengan hasil perhitungan periode 2020 sejumlah 100,56% dan periode 2021 sejumlah 102,35%. Rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2022 tetapi masih termasuk dalam kriteria efektif karena ada diantara >90%-100%, dengan persentase 96,79%. Kinerja pemerintahan yang efektif merujuk pada kemampuan suatu pemerintah untuk menggapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Artinya, pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu mengusahakan pelayanan umum yang bermutu, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memaksimalkan ketentraman secara menyeluruh. Kinerja pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan-tujuan tertentu, tetapi juga dari proses-proses dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pemerintah yang efektif harus menjaga keseimbangan antara efisiensi administratif dan pelayanan yang berkualitas, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh warga.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022 dari segi efektivitas telah sesuai dengan perspektif islam, seperti yang terdapat dalam hadist riwayat Muslim yang artinya berikut ini : Hadist ini menggambarkan pentingnya memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam pemerintahan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang bertindak dengan adil, bijaksana, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Didasarkan pada hasil akhir dan penjelasan yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Dari segi rasio ekonomis kabupaten Rembang dikatakan ekonomis karena 3 tahun terakhir berada pada presentase 90%-100% sesuai dengan teori *Value For Money*. Namun persentase bukannya semakin naik malah semakin turun sehingga tahun 2022 berada pada kriteria cukup ekonomis dengan persentase 89,23%. Dilihat dalam perspektif ekonomi islam Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melakukan israf atau disebut dengan pemborosan anggaran daerah, karena rata-rata rasio ekonomis 2020-2022 sebesar 93,06% termasuk kategori ekonomis.

Dari segi rasio efisiensi, pemerintah kabupaten Rembang mengalami penurunan drastis selama 3 tahun terakhir. Awalnya tahun 2020 rasio efisiensi kabupaten Rembang masuk kategori efisien dengan persentase 75,90%. Sangat disayangkan tahun 2021-2022 persentase semakin menurun menjadi 95,23% kategori kurang efisien sampai ke persentase 108,16% termasuk kategori tidak efisien. Rata-rata rasio efisiensi 93,09% masuk kriteria kurang efisien.

Dari segi rasio efektivitas, pemerintah kabupaten Rembang mengalami naik turun persentase selama 3 tahun terakhir, tetapi penurunan tersebut tidak terlalu buruk karena dari yang awalnya sangat efektif menjadi efektif. Jika di rata-rata, rasio efektivitas tahun 2020-2022 sebesar 99,9% termasuk kategori efektif. Dilihat dari segi perspektif islam, kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022 telah sesuai dengan perspektif islam yaitu bertanggungjawab. Dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang periode 2020-2022 tergolong belum optimal sepenuhnya.

Keterbatasan

Penelitian ini dalam mengukur kinerja suatu pemerintahan daerah hanya menggunakan data laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022. Keterbatasan waktu menjadi faktor peneliti tidak melihat dari sisi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) untuk memahami lebih dalam kinerja pemerintahan dalam setiap programnya-program yang dilakukan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti berikutnya yang akan menjelajahi topik serupa diharapkan melaksanakan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Selain mempertimbangkan laporan realisasi anggaran, penting juga untuk memperhatikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) agar mendapatkan kepehaman yang lebih jelas tentang kinerja pemerintah dalam setiap programnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafidz, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020* (Rembang, 2020)
Abdul Rokhim, Vachri Rinaldy Lutfipambudi, 'APBD Rembang Tahun 2023 Defisit Rp 142 M, Percepatan APBD Perubahan Tak Kunjung Terlaksana, Ini Masalah', *Radar Kudus*, 2023
<<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691817986/apbd-rembang-tahun-2023-defisit-rp-142-m-percepatan-apbd-perubahan-tak-kunjung-terlaksana-ini-masalahnya>>

- Afan Martadi, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021* (Rembang, 2022)
- Al-qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Sindonews, 2023)
<<https://kalam.sindonews.com/surah/5/al-maidah>>
- Anugrahadi, Yoga Dwi, and Ari Prasetyo, 'Mengetahui Pengaruh Kinerja Islam Terhadap Motivasi Islam, Komitmen Islam, Dan Pelatihan Islam Pada Karyawan Pt. Asuransi Takaful Keluarga Di Jakarta', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.8 (2019), 680
<<https://doi.org/10.20473/vol5iss20188pp680-698>>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Armereo, Crystha, 'Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan Di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang', *Jurnal Ekombis Review*, 9.2 (2021), 241–54
- Aulia, Erlinda Nur, and Agustina Prativi Nugraheni, 'Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.6 (2022), 413–20
<<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>>
- Basri, Ramlah, 'Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran', *Jurnal EMBA*, 1 (4) (2013), 202–12
- Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Budi Bagaskoro, 'Analisis Anggaran Operasional Dan Realisasinya Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Penilaian Kinerja Perusahaan', *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2.3 (2017), 324–37
- Cunha, Adriana Alesandra Da, Henrikus Herdi, and Pipiet Niken Aurelia, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka', *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2 No.3 (2023), 86–100
<<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1180>>
- Dinkoinforembang, 'Pemerintah Kabupaten Rembang' <<https://rembangkab.go.id/>> [accessed 10 February 2024]
- Ekundayo, Woleola J, 'Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria', *International Journal of Humanities and Social Science*, 7.5 (2017), 154–61
- Fania, Aulya Dini, Marti Dewi Ungakri, and Cecep Hamzah Pansuri, 'Pengukuran Kinerja Berdasarkan Value For Money Pada Dinas Sosial Kabupaten Garut', *Jurnal Wahana Akuntansi: Sarana Informasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5.2 (2020), 82 <<https://doi.org/10.52434/jwa.v5i2.2024>>
- Gunawan, Barbara, and Alifia Putriantoro, 'Analisis Pendapatan Dan Belanja Menggunakan Aspek Value for Money', 17.2 (2022), 1–15
- Hasanah, Miftahul, and Merri Anitasari, 'Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas)', *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1.2 (2020), 1–12
<<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>>
- Hatta, Zulhelmy, Emkhad Arif, and Nabilah Tyas Garini, 'Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau', *Economics, Accounting and Business Journal*, 1.1 (2021), 198–211

- Humas, 'Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19', *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 9 April 2020 <<https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>>
- Hutabarat, Francis, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (banten: desanta muliavisitama, 2020)
- Idrika, Melta, Novi Mubyarto, and Efni Anita, 'Analisis Pengukuran Value for Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2.1 (2023), 53–66
- Jadid, Paisal, Lalu Husnan, and Laila Wardani, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Paisal Jadid / A1B118175 / Analisis Kinerja', *Jurnal Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Universitas Mataran (JRK)*, 1.1 (2020), 56–67
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Kabupaten Katingan, Pemerintah, 'Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah', 00.August (2022), 1–2
- Karina, Luthfia Ayu, and Wahyu Ramadhani, 'Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong', *Value*, 2.2 (2022), 71–82 <<https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>>
- Karjono, and Sulistianingsih, 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas Perhubungan)', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23.3 (2020), 272–302
- Kultum Ramadhan : 7 Prinsip Etika Kerja Dalam Islam', *Universitas Teuku Umar*, 2023 <<https://utu.ac.id/berita/kultum-ramadhan-7-prinsip-etika-kerja-dalam-islam/>> [accessed 11 January 2024]
- Lating, Ade Irma Suryani, Hayudian Kusumandaru, Mochammad Ilyas Junjuran, and Eva Wany, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Value for Money', *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 4.1 (2023), 18–37 <<https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2340>>
- Lontaan dan Pangerapan, 'Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014', *Jurnal EMBA*, 4(1) (2016), 898–906 . LRA REMBANG 2020.Pdf
- Lutfipambudi, Vachri Rinaldy, 'Duh!! Defisit APBD Rembang 2023 Berpotensi Membengkak Menjadi Rp 290 Miliar, Ini Penyebabnya', *Radarkudus*, 2023 <<https://radarkudus.jawapos.com/rembang/692896677/duh-defisit-apbd-rembang-2023-berpotensi-membengkak-menjadi-rp-290-miliar-ini-penyebabnya>>
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN, 2007)
 ———, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (3rd ed.) (UPP STIM YKPN, 2015)
- Mahsun, Dkk, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2013)
- Mahsun, M, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2006)
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020)

- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2015)
- , *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, 1st edn (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002)
- Maryanti, C Susi, and Agus Munandar, ‘Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 Jimea | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)’, *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5.3 (2021), 2886–99
- Mentang, Fanda, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan, ‘Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado’, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15.2 (2020), 131 <<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28006.2020>>
- Moh. Mahsun, *Penganggaran Sektor Publik*, Cetakan pe (Banten: Universitas Terbuka) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>>
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003)
- Muhammad Bahrul ulum dan Ayu Geby Gisela Syaputri, ‘Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Di Sumatera Selatan’, 20.2 (2021), 111–22
- Muhammad Faniawan Asriansyah, ‘Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pencegahan’, *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2022 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>>
- Munandar, M, *Budgeting: Perencanaan Kerja Pengorganisasian Kerja Pengawasan Kerja* (Yogyakarta: PT BPFU UGM, 2001)
- Mutmainnah, Nurul, ‘Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020’, 2022, 1–8
- Nasution, D. A. D., . . *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Dae- Rah)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Ni Nyoman Kurnia W, Nyoman Ayu Putri Lestari, I Nyoman Sudiana, Ida Bagus Putrayasa, ‘Analisis Pendekatan CBSA Dan Pembelajaran Berdeferensiasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia’, *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 6.November (2022), 255–64 <<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wacanaakademika/index>>
- Nubatonis, Sondil E, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, Program Studi, Ilmu Administrasi, and Universitas Tribhuwana Tungadewi, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik’, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.1 (2014), 16–20
- Nurlina T. Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, Anna Yulianita, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*, ed. by Isnaini Khasanah (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Pangkey, Imanuel dan Sherly Pinatik, ‘Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal Emba*, 3 (4) (2015), 33–43
- Pasrizal, Himyar, and Fajrur Rahmi, ‘Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Di Lembaga Keuangan Syariah’, *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2021), 149 <<https://doi.org/10.31958/ab.v1i2.2758>>
- Perdana, Tito Aditya, Risanda A. Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra,

- ‘Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money’, *Journal Inovasi*, 16.2 (2020), 339–46 <<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>>
- Prasetyo, Wahyu Heri, and Agustina Prativi Nugraheni, ‘Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas’, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11.1 (2020), 1–10
- Pratama, Versiandika Yudha, Syamsuddin, and Farah Difa, ‘Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan’, *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1.2 (2022), 149–55 <<https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>>
- Putri Nurafifah, Indah, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana, ‘Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)’, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2.2 (2022), 56–71 <<https://doi.org/10.51903/jiab.v2i2.170>>
- Rachmi, Bilqist Luthfia, Ade Ali Nurdin, and Banter Laksana, ‘Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Pada PT Kimia Farma Tbk Tahun 2016-2020’, *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2.1 (2021), 95–107 <<https://doi.org/10.35313/ijem.v2i1.3107>>
- Safiul Huda dan Ati Sumiati, ‘Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah’, *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14, No.1 (2019), 85–100
- Salmaa, ‘Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, Dan Contoh’, *Deepublish*, 2023 <<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>> [accessed 26 January 2024]
- Sampow, Richardo, and Royke Pangkey, ‘Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung’, *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2.3 (2022), 261–71 <<https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>>
- Sari, Berti Indah, and Halma Wati, ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3.1 (2021), 1–11 <<https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>>
- Sedarmayanti, *Good Governance Dan Good Corporate Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Sholikhah, Agustiyana Lailatus, and Nuwun Priyono, ‘Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara’, *Jurnal Akuntansi*, 14.1 (2022), 1–12 <<https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>>
- Sinatraz, Viony, and Sugi Suhartono, ‘Jurnal Akuntansi Dan Pajak’, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6.1999 (2021), 1–13
- Solihin, Deni, ‘Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money Pada Politeknik TEDC Bandung’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13.2 (2019), 102–7
- Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005)
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013)
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Sukirno, S, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (3rd ed.) (Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2012)
- Sutama, I Nyoman, Fani Fatona, and Nining Sudiyarti, 'Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money (Studi Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)', *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 2.2 (2022), 193–200 <<https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1020>>
- Syafrudin, 'Peraturan Wali Kota Serang', 2016, pp. 1–23
- Tameon, Alwin Fedianto, Sarinah Joyce M. Rafael, and Linda Lomi Ga, 'Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perode 2017-2021', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11.1 (2023), 40–50 <<https://doi.org/10.35508/jak.v11i1.10250>>
- Uar, A, 'Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1) (2016), 1–11
- Ulum MD, Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar*, Cetakan Ke (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005)
- 'UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah'
- 'UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah'
- 'UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.'
- Wakhid Yuliyanto, Sri Wahyuningsih, Rizki Kurniasih, and Ari Waluyo, 'Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan "Value For Money" Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas "X" Di Sektor Publik.', *Jurnal E-Bis*, 7.1 (2023), 233–45 <<https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>>
- William Sanger, Gerald, Hendrik Manossoh, and Claudia W M Korompis, 'Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6.2 (2023), 1193–1202